

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Teori Agensi Tipe II (*Agency Theory Type II*)

Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan potensi konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. Sesuai dengan teori agensi tipe II dimana dalam hal ini pemegang saham pengendali sebagai *agent* dan pemegang saham minoritas sebagai *principal*. Pemegang saham pengendali dapat mengambil tindakan untuk menguntungkan dirinya sendiri namun merugikan pemegang saham minoritas. Tindakan tersebut adalah tunneling, yaitu pengalihan asset perusahaan secara tidak sah ke pihak lain yang terafiliasi dengan manajemen (pemegang saham mayoritas). Berdasarkan teori ini menyoroti pentingnya mekanisme pengendalian agar pemegang saham mayoritas tidak menyalah gunakan kekuasaan yang dimilikinya. Jika pemegang saham minoritas tidak terus mengawasi kinerja perusahaan, bisa jadi pengambilan keputusan tidak memperhatikan kepentingan bersama.

Adapun kaitannya dengan penelitian yang dilakukan tunneling melalui transfer pricing menjadi representasi nyata dari bagaimana prinsip-prinsip teori agensi dilanggar dalam praktik bisnis yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini menekankan pentingnya penelitian yang berfokus pada bagaimana mengurangi praktik-praktik

semacam ini melalui peningkatan tata kelola perusahaan dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, termasuk peran penting yang dapat dimainkan oleh direktur perempuan dalam dewan direksi.

2. *Gender Diversity Theory*

Teori Gender diversity oleh (Welsh, 1992) mengatakan bahwa gender bukan hanya perbedaan biologis, melainkan konstruksi sosial yang terbentuk melalui norma kultural, struktur institusional, dan praktik profesional dimana adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan cenderung lebih berhati-hati dan teliti dalam mengambil keputusan, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan dan banyak ide-ide yang inovatif sehingga juga mempengaruhi profitabilitas perusahaan (Raharjanti, 2019). Saat ini keberagaman gender dalam perusahaan sudah menjadi suatu strategi perusahaan yang cerdas dan ingin terus berkembang. Karena keberadaan perempuan dalam jajaran direksi dapat membawa perspektif yang berbeda, yang akan berdampak pada pengambilan keputusan terkait transfer pricing. Lebih banyak perempuan di posisi kepemimpinan cenderung memiliki kebijakan yang lebih adil dan transparan.

Perempuan cenderung lebih memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosial, serta keinginan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Sehingga kebijakan transfer pricing yang diterapkan oleh

perusahaan dengan keberagaman gender yang lebih baik dapat mengurangi potensi tunneling, di mana pemegang saham mayoritas memanfaatkan posisi mereka untuk mengalihkan keuntungan secara tidak adil dari perusahaan. Berkaitan dengan penelitian ini keberadaan direktur perempuan apakah dapat meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap praktik-praktik keuangan yang berisiko, sehingga mendorong transparansi dalam laporan keuangan dan mengurangi kemungkinan manipulasi harga transfer yang berujung tunneling. Dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dewan direksi tidak hanya memperkaya perspektif pengambilan keputusan, tetapi juga berkontribusi pada tata kelola perusahaan yang lebih baik dan dapat mendukung integritas serta keberlanjutan bisnis secara keseluruhan.

3. Transfer Pricing

a. Pengertian Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan kebijakan yang diterapkan perusahaan dalam menetapkan harga atas transaksi barang atau jasa dengan entitas lain yang memiliki hubungan afiliasi (Maulani et al., 2021). Transaksi ini bisa berupa penjualan barang, penyediaan jasa, peminjaman dana, atau penggunaan aset tak berwujud. Walaupun transfer pricing merupakan praktik yang diperbolehkan, namun oleh perusahaan kerap disalahgunakan untuk tujuan penghindaran pajak dengan mengalihkan pendapatan perusahaan ke negara dengan beban pajak yang lebih ringan untuk mengurangi

kewajiban pajak melalui mekanisme transfer pricing. Misalnya, sebuah perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak tinggi dapat menjual produknya ke perusahaan afiliasi yang berlokasi di negara dengan *tax haven* rendah. Anak perusahaan tersebut kemudian menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan laba yang besar di negara dengan tarif pajak rendah.

Salah satu skema transfer pricing pada tahun 2020-2022 terdapat pengiriman bijih nikel ilegal yang dilakukan dengan praktik transfer pricing yang merugikan pendapatan negara sebesar Rp 14,5 triliun. Praktik ini terjadi sebelum penerapan peraturan baru oleh pemerintah untuk mengatur ekspor nikel (*Bisnis.Com*, 2023). Praktik ini dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan secara keseluruhan. Otoritas pajak di berbagai negara berupaya untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing dengan menerapkan aturan dan regulasi yang ketat. Selain itu mereka juga melakukan audit dan investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan praktik transfer pricing yang tidak wajar.

Prinsip utama yang digunakan oleh otoritas pajak adalah prinsip *arm's length*, yang menyatakan bahwa harga transfer antar perusahaan terafiliasi harus sama dengan harga yang akan disepakati oleh pihak-pihak yang independen dan tidak memiliki

hubungan istimewa. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa transfer pricing adalah kebijakan yang diterapkan perusahaan dalam menetapkan harga atas transaksi barang atau jasa dengan entitas lain yang memiliki hubungan afiliasi guna meminimalisir pajak perusahaan melalui pembayaran pajak di luar negeri.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan transfer pricing antara lain profitabilitas, leverage, asset tidak berwujud dan ukuran perusahaan. Profitabilitas dapat berdampak pada penetapan harga transfer karena dalam mencapai keuntungan, perusahaan harus mempertimbangkan penggunaan modal, penjualan, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk menetapkan harga transfer (Solihin et al., 2023). Penelitian oleh Apriani et al (2021) juga mengatakan bahwa transfer pricing mempengaruhi leverage, dikarenakan perusahaan cenderung melakukan keputusan transfer pricing jika nilai leverage semakin tinggi. Asset tidak berwujud mempengaruhi keputusan transfer pricing suatu perusahaan (Yusmaniarti et al., 2021). Besarnya ukuran perusahaan dapat berdampak pada keputusan transfer pricing, karena perusahaan besar umumnya melakukan transaksi

internasional yang melibatkan perbedaan tarif pajak antar negara (Ilmi & Prastiwi, 2020).

c. Indikator Transfer Pricing

Untuk mengetahui suatu perusahaan melakukan transaksi transfer pricing atau tidak, maka peneliti perlu melakukan pencarian data melalui laporan keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini indikator untuk menghitung transfer pricing yaitu dengan membagi piutang pihak berelasi dan total piutang (Yusmaniarti et al., 2021).

$$\text{Transfer pricing} = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$$

4. Tunneling

a. Pengertian Tunneling

Tunneling adalah praktik pemindahan kekayaan perusahaan oleh pemegang saham pengendali melalui berbagai mekanisme, termasuk transaksi pihak terkait, dividen istimewa, atau transfer pricing. Dalam konteks transfer pricing, tunneling sering digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk mengalihkan keuntungan dari perusahaan yang mereka kendalikan ke entitas lain dalam grup perusahaan (Jafri & Mustikasari, 2018). Hal ini dilakukan dengan menetapkan harga transaksi yang tidak wajar, sehingga menguntungkan entitas tertentu yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tunneling lebih sering

terjadi pada perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi, seperti di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana pemegang saham pengendali memiliki kontrol signifikan atas keputusan perusahaan.

(Rahmawati & Rohman, 2024) menjelaskan bahwa struktur kepemilikan seperti ini membuka peluang bagi pemegang saham pengendali untuk memprioritaskan kepentingan mereka sendiri dibandingkan kepentingan pemegang saham minoritas. Tunneling juga sering kali dilakukan untuk menghindari distribusi laba kepada pemegang saham minoritas melalui dividen, sehingga transfer pricing menjadi alat strategis untuk memaksimalkan keuntungan pribadi tanpa harus melibatkan pihak lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa tunneling adalah pengalihan aset, laba, atau sumber daya perusahaan oleh pemegang saham pengendali memanfaatkan pemegang saham minoritas untuk kepentingannya sendiri yang bersifat merugikan melalui transfer pricing, seperti menjual aset di bawah harga pasar kepada perusahaan afiliasi dan tidak membagikan dividen perusahaan.

b. Indikator Tunneling

Untuk mengetahui data tunneling perusahaan, peneliti menggunakan laporan keuangan sebagai objek penelitian yang

didapat dari website resmi perusahaan ataupun www.idx.co.id. Adapun indikator yang digunakan untuk menghitung tunneling yaitu dengan membagi piutang lain-lain dengan total asset (Nuraina et al., 2022).

$$\text{Tunneling} = \frac{\text{Total Piutang lain – lain}}{\text{Total asset}}$$

5. Direktur Perempuan

a. Pengertian Direktur Perempuan

Direktur perempuan merupakan seorang wanita yang ditunjuk untuk menempati posisi direktur dalam suatu perusahaan yang berperan dan diberi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis untuk mengelola perusahaan. Direktur perempuan juga memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam hal transfer pricing. (Nurpratiwi et al., 2023) menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan direksi dapat membawa perspektif baru yang lebih etis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang semua pemangku kepentingan. Dalam konteks transfer pricing, direktur perempuan dapat bertindak sebagai moderasi terhadap praktik-praktik tidak etis seperti tunneling, karena mereka lebih cenderung menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi antar entitas. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa direktur

perempuan merupakan seorang wanita yang dipercayai untuk menjadi direktur suatu perusahaan dimana direktur perempuan tersebut dapat mengambil keputusan yang strategis.

b. Indikator Direktur Perempuan

Untuk mengetahui representasi perempuan dalam dewan direksi perusahaan, peneliti menggunakan perhitungan proporsi jumlah direktur perempuan dibagi dengan total dewan direktur perusahaan (Gunawan & Wijaya, 2021)

$$\text{Direktur perempuan} = \frac{\text{Direksi perempuan}}{\text{Dewan direksi perusahaan}}$$

6. Variabel Kontrol

Guna variabel kontrol dalam penelitian ini adalah untuk menghindari terjadinya bias dalam hasil analisis dan agar dapat mengurangi dampak faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi transfer pricing maupun tunneling. Penelitian ini mengaplikasikan leverage, kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Leverage diukur menggunakan rasio utang, yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR), dengan cara total utang dibagi total aset perusahaan. Kinerja perusahaan diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA) yaitu dengan cara laba setelah pajak dibagi total asset, sementara ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan.

a. Leverage

Leverage mencerminkan sejauh mana perusahaan mendanai aktivitas operasionalnya melalui utang. *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR). Tingginya *Debt to Asset Ratio* (DAR) menunjukkan bahwa perusahaan memiliki porsi utang yang lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Kondisi ini dapat memengaruhi kebijakan transfer pricing yang diterapkan perusahaan. Jika perusahaan memiliki *Leverage* tinggi, perusahaan tersebut cenderung memiliki dorongan untuk melakukan transfer pricing secara agresif guna mengatur beban bunga serta dampaknya terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, leverage dapat diartikan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya melalui penggunaan utang. Indikator untuk menghitung leverage yaitu dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) (Made et al., 2020).

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

b. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan indikator penting yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas operasional serta keuangan suatu perusahaan. Kinerja yang baik dapat memberikan fleksibilitas bagi manajemen untuk mengambil keputusan strategis. Kinerja perusahaan juga dapat dilihat dari tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran

yang strategis dan financial melalui sumber daya yang optimal dan efisien. Kinerja perusahaan biasanya menjadi tolok ukur keberhasilan dan daya saing perusahaan di pasar. Keterkaitan kinerja perusahaan dengan praktik transfer pricing yang digunakan untuk tunneling dapat menurunkan nilai perusahaan dan merusak kepercayaan investor, sehingga berdampak negatif pada kinerja keuangan dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, pengawasan dan tata kelola yang baik sangat penting dalam meminimalisir dampak negatif tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa kinerja perusahaan mencerminkan efisiensi dan efektivitas operasional serta keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) (Strouhal et al., 2018). Penggunaan ROA dipilih karena secara luas digunakan untuk mengukur profitabilitas relatif perusahaan terhadap total aset yang dimilikinya.

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

c. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya suatu entitas bisnis berdasarkan nilai total aset yang dimiliki untuk menilai kapasitas ekonomi dan pengaruh pasar dari suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dikategorikan menjadi 3 yaitu besar, kecil dan menengah. Untuk mengukur ukuran perusahaan

biasanya menggunakan logaritma total asset untuk menyesuaikan skala nilai asset yang besar. Ukuran perusahaan secara signifikan mempengaruhi praktik transfer pricing dan tunneling, di mana perusahaan besar cenderung lebih aktif melakukan kedua praktik tersebut. Peran direktur perempuan sebagai moderator dapat memperkuat pengawasan internal, menekan praktik tunneling yang merugikan, dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Sehingga pengelolaan perusahaan yang melibatkan keberadaan direktur perempuan dapat menjadi strategi efektif dalam mengendalikan praktik manipulatif dan menjaga kinerja perusahaan yang sehat.

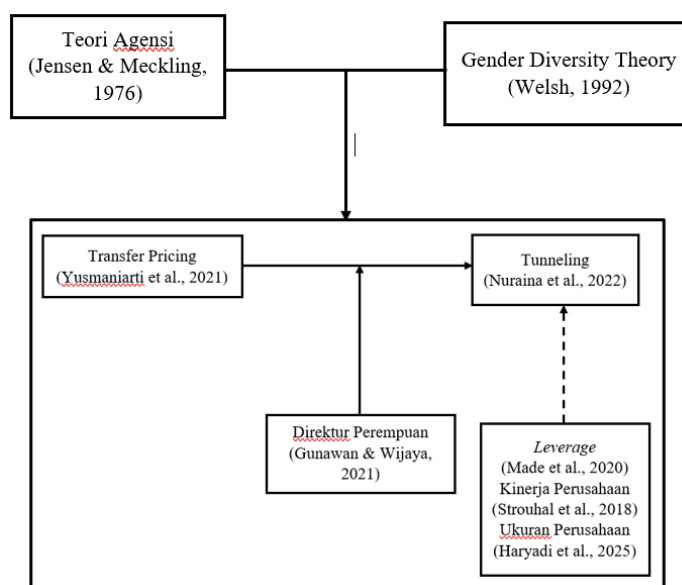
Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan merupakan pengukuran untuk menunjukkan besar atau kecilnya perusahaan dilihat dari sumber daya perusahaan. Untuk mengetahui rasio ukuran perusahaan, peneliti menggunakan indikator logaritma natural dari total asset (Haryadi et al., 2025).

$$Size = \ln(Total Asset)$$

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu dan dilandasi dengan teori yang relevan, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh transfer pricing terhadap tunneling dengan mempertimbangkan peran direktur perempuan sebagai variabel moderasi. Dimana transfer

pricing berperan sebagai variabel independen, diduga memengaruhi praktik tunneling sebagai variabel dependen, yang didasarkan pada penelitian sebelumnya dan didukung oleh teori keagenan yang menjadi aspek tata kelola perusahaan. Direktur perempuan sebagai variabel moderasi yang didukung oleh teori Gender Diversity berperan dalam memperkuat pengawasan dan mengendalikan praktik manipulatif perusahaan. Untuk meningkatkan akurasi dan menghindari bias, penelitian ini juga menyertakan 3 variabel kontrol yaitu: leverage, kinerja perusahaan, dan ukuran perusahaan.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

C. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tunneling

Hubungan antara transfer pricing dan tunneling dalam kerangka teori agency memunculkan dinamika kompleks yang tercermin dalam

temuan penelitian empiris dengan hasil beragam. Hipotesis utama menyatakan bahwa praktik transfer pricing meningkatkan risiko tunneling melalui mekanisme asimetri informasi, di mana pemegang saham pengendali memanipulasi harga transaksi antar entitas untuk mengalihkan kepihak terkait. Teori agency menjelaskan konflik ini sebagai bentuk moral hazard atau bahaya moral, di mana kontrol dominan atas keputusan korporasi memungkinkan perampasan atau pengambilan alih kekayaan pemegang saham minoritas melalui rekayasa laba dan alokasi sumber daya tidak wajar. Beberapa peneliti terdahulu mengungkapkan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh positif terhadap tunneling. Studi pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* BEI (2019-2021) menunjukkan berpengaruh signifikan antara intensitas transfer pricing dengan tunneling (Lubis et al., 2024). Dalam konteks teori agensi, ini menciptakan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas, di mana pemegang saham pengendali mungkin lebih memilih untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Transfer pricing merupakan kebijakan suatu entitas untuk menentukan harga transaksi yang dilakukan dengan entitas lain yang memiliki hubungan istimewa (Shalsabila Herman et al., 2023). Praktik ini biasa digunakan perusahaan untuk meminimalisir pajak perusahaan, tetapi banyak perusahaan yang menyalahgunakan dan menggunakannya untuk penghindaran pajak yang tentunya illegal. Penelitian oleh

Hariyani & Ayem (2021) mengatakan bahwa tunneling incentive berpengaruh positif terhadap harga transfer, dengan menunjukkan perusahaan yang terlibat dalam tunneling lebih mungkin untuk menetapkan harga transfer yang menguntungkan bagi pemegang saham mayoritas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang mencatat bahwa peningkatan tunneling incentive dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan transaksi transfer pricing yang adil (Kurniawan et al., 2018).

(Ubaidillah, 2023) mengatakan praktik transfer pricing yang melibatkan pergeseran keuntungan untuk meminimalkan beban pajak, berdampak signifikan pada tunneling. Selain itu tunneling atau ekstraksi sumber daya dari pemegang saham minoritas, dapat diperburuk oleh strategi transfer pricing yang agresif. (Aditya & Sri Lastanti, 2024) juga mengatakan insentif tunneling dapat mendorong praktik transfer pricing, menunjukkan hubungan langsung antara transfer pricing dan tunneling. Perusahaan dapat terlibat dalam transfer pricing untuk mengalihkan keuntungan dan meminimalkan kewajiban pajak, yang dapat memfasilitasi tunneling dengan memungkinkan pemegang saham mayoritas untuk mengekstraksi nilai dengan mengorbankan pemegang saham minoritas. Maka hipotesis berdasarkan teori yang digunakan disertai dukungan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah:

H1: Transfer Pricing Berpengaruh Terhadap Tunneling

2. Direktur Perempuan Memoderasi Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tunneling

Keberadaan direksi perempuan dalam perusahaan dapat mempengaruhi keputusan strategis, termasuk dalam penetapan harga transfer. Beberapa peneliti terdahulu mengemukakan bahwa keberagaman gender dalam jajaran direksi dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih etis dan transparan. Adanya perempuan dalam posisi kepemimpinan, perusahaan mungkin lebih cenderung untuk mempertimbangkan kepentingan semua pemegang saham dalam penetapan harga transfer. Sebuah studi oleh Syahfitri et al (2022) menunjukkan bahwa keberadaan direksi perempuan dapat membantu mengurangi permasalahan keagenan dalam perusahaan. Selain itu, kepemimpinan perempuan berperan penting dalam mendorong kesejahteraan serta menciptakan keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan perempuan dalam dewan direksi juga dapat memperkuat mekanisme tata kelola perusahaan melalui sudut pandang yang beragam dan pengawasan yang lebih efisien. Bukti empiris dari Purkayastha & Pattnaik (2025) mengatakan bahwa direktur perempuan secara strategis menekankan fungsi monitoring dalam komite dewan, yang memperkuat tata kelola dan pengawasan terhadap kepentingan stakeholder yang lebih luas. Dalam konteks multinasional, transfer pricing yang agresif untuk tujuan tunneling sering mengorbankan hak

pemegang saham minoritas Purwanto & Tumewu (2018); Refgia et al (2017). Studi terbaru tentang board gender diversity oleh (Chang et al., 2024) direktur perempuan membantu menjaga konsistensi strategi stakeholder, bahkan saat kondisi kompleks dan tidak menentu menunjukkan kemampuan direktur perempuan memprioritaskan keberlanjutan jangka panjang. Sebuah studi juga dilakukan oleh Krisyadi et al., (2024) terhadap 58 perusahaan sektor financial yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa keberagaman gender di dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan Sohdi, (2024) perusahaan BUMN di Indonesia dengan keberagaman gender di dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan, sementara keberagaman di dewan komisaris justru berpengaruh positif. Dampak keberagaman gender berbeda-beda tergantung pada struktur dan situasi perusahaan. Karena penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan hasil, diduga ada faktor-faktor tertentu yang memengaruhi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan keberadaan direktur perempuan sebagai faktor moderasi untuk membuktikannya. Komposisi direktur perempuan yang tinggi akan memperkuat fungsi moderasi dengan mengalihkan fokus kebijakan transfer pricing dari kepentingan pemegang saham dominan ke pertimbangan keberlanjutan bisnis dan reputasi korporasi, sehingga mengurangi intensitas tunneling.

H2: Direktur Perempuan Mampu Memoderasi Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tunneling